

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bahasan Konseptual

2.1.1. Partisipasi Politik

Secara etimologis, partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang mempunyai arti bagian serta *capere*, yang mempunyai arti mengambil, sehingga dapat diartikan “mengambil bagian”. Sedangkan dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Sehingga partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. (Josep 2018 : 7)

Dapat dikatakan partisipasi politik merupakan salah satu bagian aspek penting dalam suatu demokrasi. Suatu keputusan politik yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut serta mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara juga berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik. Oleh sebab itu, yang dimaksud partisipasi politik ialah keikutsertaan warga sipil dalam menentukan berbagai keputusan mengenai hal-hal yang bersangkutan dan mempengaruhi kehidupannya (Surbakti, 2019: 180).

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik pada hakikatnya merupakan tindakan yang suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun.

Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih. Partisipasi politik merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat menghendaki terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga (Miiiaz, 2012: 20).

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menggunakan konsep partisipasi Menurut Huntington dan Nelson (dalam Miaz, 2012: 23) yang mana menyatakan bahwa “partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi, yang bermaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.”

Adapun menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahi Ilmu Politik (2019: 151) “Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan”.

Berdasarkan definisi tersebut yang dimaksudkan dalam kegiatan tersebut ialah mengutarakan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan atau mengutarakan kritik, koreksi serta saran terhadap penerapan dalam kebijakan umum serta memberikan dukungan atau tentangan terhadap salah satu calon kemudian memberikan saran dengan mengajukan calon dan memilih wakil rakyat yang sesuai dalam pemilu.

Adapun juga beberapa konsep mengenai partisipasi politik menurut

para ahli dalam buku Miriam Burdiardjo yang berjudul Dasar-Dasar Politik Indonesia (2008: 367-368) diantaranya:

1. Menurut Miriam Burdiardjo Partisipasi politik ialah kegiatan salah satu orang atau lebih orang yang ikut berperan aktif dalam kegiatan politik, salah satunya ikut dalam pelaksanaan pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung serta ikut berpartisipasi dalam memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang ditentukan pemerintah.
2. Menurut Herbet Mclosky mengemukakan bahwa partisipasi politik ialah berbagai aktivitas yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat dengan cara ikut serta dalam pemilihan pemimpin yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Menurut Huntington dan Nelson dalam (Josep: 10: 2018) adapun indikator dalam partisipasi politik diantaranya ialah:

- a. partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap.
- b. subyek partisipasi politik adalah *private citizen* (warga negara yang tidak memiliki jabatan resmi dalam pemerintahan) atau orang perorang dalam perannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional di bidang politik.
- c. Kegiatan dalam partisipasi politik ialah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditunjukkan kepada pejabat-

pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik.

d. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan mempengaruhi pemerintah terlepas apakah tindakan tersebut memiliki efek atau tidak.

e. Partisipasi politik menyangkut partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasikan.

Selain itu partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai kegiatan perseorangan maupun komunitas orang yang ikut serta dalam kegiatan perpolitikan, contohnya saat memilih presiden dalam pemilihan umum, berperan aktif dalam memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah (Suparto, 2020: 10).

Bagi negara yang merupakan negara demokrasi, partisipasi merupakan bagian yang sangat penting dalam negara untuk kehidupan politiknya. Pentingnya partisipasi politik yang dilakukan warga negara dalam suatu negara berkaitan dengan suatu hak dan kewajiban seseorang maupun kelompok untuk dapat menerima dan menggunakannya sebagai sumber daya sosial untuk dapat mempengaruhi segala keputusan maupun kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Yang dimaksud dalam kegiatan partisipasi politik disini ialah dalam mempengaruhi keputusan pemerintah, diantaranya adalah membujuk maupun menekan pejabat atau penguasa pemerintah agar dapat bertindak secara tertentu untuk menggagalkan suatu keputusan, berupaya untuk mengubah aspek-aspek dalam sistem politik ataupun mengubah suatu sistem politik supaya pemerintah lebih cepat peka terhadap apa yang

dinginkan mereka (Kusmanto, 2013: 42-42).

a. Partisipasi politik masyarakat

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah prinsip dasar serta kunci yang harus di tanamkan dalam masyarakat demokrasi. Partisipasi politik masyarakat ialah bentuk tindakan yang bersifat empiris, tak sekedar perilaku atau kecenderungan warga sipil yang berperan dalam pemerintahan yang mana memiliki tujuan untuk dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Sartori & Nurohman, 2011: 382).

Partisipasi politik masyarakat sebenarnya dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang dilakukan. Namun, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang seluas itu. Sebagian masyarakat hanya tahu mengenai politik hanya sekedar menentukan pilihan saja, sehingga menurut mereka hal tersebut tidak terlalu penting, dengan golput ataupun tidak hal tersebut tidak akan mengubah nasib. Hal tersebut merupakan pemikiran sederhana yang ada dibenak masyarakat. (Suparto 2020 : 10)

Selama ini aktivitas partisipasi politik masyarakat dianggap sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk mewujudkan kepentingan pemerintah. Padahal sebetulnya partisipasi itu idealnya masyarakat berperan aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah yaitu bagian pengawasan masyarakat terhadap keputusan pemerintah (Sentolo 2021).

Salah satu cara untuk dapat mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat berdasarkan bentuk-bentuk keterlibatan

seseorang dalam berbagai tahap proses politik pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian. (Dusseldorp dalam Josep 2018 : 28)

Partisipasi politik masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yang mana dapat disesuaikan dengan berbagai keperluan dan kepentingan masyarakat masing-masing diantaranya mengawasi kinerja aparatur pemerintah, mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui protes, kritik serta saran dan sebagainya.

Berdasarkan kegiatannya terdapat dua bentuk partisipasi politik yang dapat dibedakan diantaranya partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Dalam kegiatan partisipasi politik aktif diantaranya ialah dengan memberikan usulan mengenai kebijakan umum, mengajukan solusi mengenai kebijakan umum yang diinginkan, mengajukan protes serta perbaikan sehingga kebijakan pemerintah dapat terluruskan, membayar pajak serta ikut serta dalam memilih para pemimpin pemerintah. Sedangkan dalam kegiatan partisipasi politik pasif ialah berbagai macam kegiatan yang hanya mentaati, menerima serta melaksanakan saja segala keputusan dan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah (Surbakti, 2019: 182).

Menurut Almond dalam buku Sahid yang berjudul Memahami Sosiologi Politik 2022 : 179 berdasarkan bentuk dan derajat partisipasi politik diantaranya:

1. *Voting* (pemberian suara), voting memiliki fungsi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu masyarakat

memiliki peran yang cukup signifikan untuk dapat mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah melalui bentuk voting ini. Derajat dalam partisipasi politik termasuk dalam kategori sedang.

2. *Informal Grup* (kelompok informal), merupakan bentuk partisipasi politik yang merupakan kegiatan dari kelompok-kelompok tertentu, yang mana kelompok tersebut memiliki tujuan untuk dapat menyalurkan berbagai aspirasi serta bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan kelompok tersebut bisa dengan melakukan perkumpulan-perkumpulan organisasi untuk membahas berbagai masalah serta mencari jalan keluarnya. Derajat dalam partisipasi politik termasuk dalam kategori tinggi

3. *Direct* (kontak langsung), bentuk partisipasi politik ini bersifat pribadi karena digunakan untuk kepentingan pribadi juga. Derajat dalam partisipasi politik termasuk dalam kategori rendah.

4. *Protes Activity* (aktivitas protes), bentuk partisipasi politik ini disebabkan oleh adanya ketidakpuasan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirugikan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oleh sebab itu masyarakat mencoba untuk dapat mendapatkan kembali kepuasan itu dengan melakukan berbagai aksi seperti protes, unjuk rasa atau demo.

Selain itu adapun menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam (Qodir,2016) partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Kegiatan pemilihan

Kegiatan ini ialah berupa kegiatan yang dilakukan dalam pemilihan umum. Yang dilakukan dalam kegiatan ini bukan hanya sebatas dalam menggunakan hak memberi suara namun juga melingkupi usaha persiapan dari pelaksanaan serta melakukan kampanye untuk mencari suatu dukungan agar dapat mempengaruhi hasil pemilihan.

2. *Lobbying*

Lobbying merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik yang dilakukan dengan cara membentuk komunikasi politik terhadap pribadi maupun kelompok yang bermaksud untuk mendapatkan dukungan dari para pejabat yang mempunyai kekuasaan di masyarakat. Dilakukannya kegiatan tersebut untuk dapat membentuk kekuatan, yang kemudian dapat memberikan suatu kemudahan supaya mampu meluruskan keperluan politik atau pencalonan dalam pemilu.

3. Kegiatan Organisasi

Merupakan kegiatan atau usaha yang dilaksanakan secara berhimpun guna mencapai tujuan kepentingan bersama. Kegiatan organisasi hubungannya dengan partisipasi politik ialah dimana kegiatan ini berbentuk kegiatan yang dilakukan berhimpun atau kelompok yaitu bertujuan untuk bisa mempengaruhi suatu keputusan politik.

4. *Contacting*

Merupakan langkah individual yang bertujukan kepada para

pemimpin atau penguasa pemerintah, umumnya bermaksud mendapatkan manfaat untuk seseorang atau beberapa orang saja. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipelajari bentuk kegiatan yang dilakukan adalah dalam pemilu yang bermaksud membentuk koneksi terhadap pemerintah.

5. *Violence*

Violence atau tindak kekerasan merupakan bentuk partisipasi politik yang tindakanya dituangkan berdasar tinggi atau rendahnya pemahaman politik serta tingkat kepercayaannya seseorang pada pemerintah. *Violence* juga dikatakan sebagai bentuk partisipasi politik serta bagi kepentingan analisis bermanfaat untuk menjelaskannya sebagai salah satu bagian tersendiri, artinya selaku usaha agar dapat mempengaruhi keputusan yang diambil pemerintah dengan cara mengakibatkan kerugian secara fisik kepada orang-orang maupun harta dan benda.

Terdapat juga bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya yang beragam, diantaranya:

1. Mendalami bermacam-macam persoalan politik serta sosial yaitu dengan cara mengikuti berbagai isu-isu atau berita-berita politik secara internal ataupun eksternal lewat media massa, lewat seminar, symposium, kongres serta diskusi secara bebas dengan orang lain.
2. Mengikuti kegiatan kampanye politik, diantaranya kampanye dalam menyadarkan masyarakat mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan

kejadian politik.

3. Mengikuti aksi atau demonstrasi politik yang memiliki tujuan agar dapat mempengaruhi keputusan politik.

4. Berkontribusi secara nyata dalam beragam kegiatan, seperti melakukan perbaikan sekitar atau pelayanan warga masyarakat melalui upayanya sendiri.

5. Ikut serta dalam partai politik dengan aktif ataupun dengan sewajarnya.

Itulah berbagai bentuk partisipasi politik lainnya, hal tersebut karena suatu partisipasi politik tidaklah hanya terbatas pada keikutsertaan dalam mengikuti, menyalonkan ataupun memberi suara dalam suatu pemilu (Gustina et, all. , 2019: 34-35).

Dalam berpartisipasi politik, masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong untuk melakukan partisipasi politik tersebut. Ada dua faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya suatu partisipasi politik seseorang, diantaranya adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Akan tetapi menurut Surbakti kedua faktor tersebut bukanlah faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel yang independen) maksudnya tinggi rendahnya kedua faktor tersebut juga di pengaruhi oleh berbagai faktor lainya lagi diantaranya seperti status sosial beserta status ekonomi, afiliasi politik orang tua serta pengalaman dalam organisasi. Yang dimaksud status sosial adalah kedudukan dalam masyarakat berdasarkan keturunan,

pendidikan, serta pekerjaan. Status ekonomi adalah kedudukan seseorang berdasarkan jumlah kepemilikan kekayaan. Seseorang yang diyakini memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan bukan hanya memiliki pengetahuan politik, akan tetapi juga memiliki minat dan perhatian terhadap politik, serta sikap dan kepercayaan kepada pemerintah.

Menurut Weiner dalam Buku Sahya Anggara yang berjudul Sistem Politik Indonesia (2013; 146) Adapun berbagai penyebab timbulnya gerakan menuju partisipasi politik diantaranya:

1. Modernisasi dalam segala aspek kehidupan yang menimbulkan masyarakat menuntut agar dapat ikut serta akan hal kekuasaan politik.
2. Struktur kelas sosial yang berubah, permasalahan siapa yang berhak dalam melakukan partisipasi serta pembuatan keputusan politik adalah hal penting yang akan menimbulkan perubahan dalam pola partisipasi politik.
3. Pengaruh para intelektual serta komunikasi massa modern, akal dari demokratisasi menyebar luas terhadap bangsa baru sebelum mereka mengembangkan kemodernan serta industrialisasi yang matang.
4. Adanya konflik diantara berbagai kelompok pemimpin politik, sehingga apabila terjadinya konflik antar elite maka yang akan dibutuhkan adalah dukungan dari masyarakat, terjadinya perjuangan dalam pertarungan antara kelas menengah dengan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh serta membantu perluasan hak pilih rakyat.

5. Adanya keterlibatan pemerintah yang luas akan hal urusan sosial, ekonomi serta budaya, semakin meluasnya aktivitas pemerintah yang sering merangsang timbulnya berbagai tuntutan yang tertata akan kesempatan pengikutsertaan dalam hal pembuatan keputusan politik.

Pada dasarnya masyarakat memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam urusan politik. Perilaku politik itu sendiri merupakan interaksi diantara pemerintah dan masyarakat ataupun interaksi diantara berbagai lembaga pemerintah dan perkelompokan serta perseorangan dalam masyarakat dimana dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan serta penegakan keputusan politik (Surbakti, 2019 :20). Perilaku masyarakat dalam berpartisipasi politik mempunyai berbagai cara atau sudut pandangnya masing-masing. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan mereka.

Adapun berbagai jenis-jenis perilaku masyarakat dalam partisipasi politik menurut Milbrath dan Goel (dalam Anggara, 2013: 152) diantaranya:

- 1) *Apatis*, merupakan orang yang tidak peduli akan politik sehingga tidak mempermasalahkan hal apapun mengenai politik.
- 2) *Spektor*, merupakan orang yang setidaknya pernah berpartisipasi politik misalnya pernah memberikan suaranya dalam pemilu.
- 3) *Gladiator*, merupakan orang yang sering berkomunikasi dan sering berinteraksi dengan tatap muka. Biasanya mereka adalah seorang aktivis partai atau anggota partai yang sering berkampanye.

4) *Pengkritik*, salah satu bentuk partisipasi politik yang tidak konvensional.

b. Partisipasi Politik Digital

Seiring datangnya era demokrasi digital, berbagai bentuk partisipasi telah mengalami kemajuan ke bentuk digital, maka dengan adanya keberadaan teknologi digital dapat berpotensi untuk memacu peningkatan partisipasi politik yang mana menjadi sebuah ruh dari demokrasi (Andriadi, 2017: 6).

Partisipasi politik digital masyarakat diarahkan pada keterlibatan individu akan kegiatan politik dengan menggunakan sosial media serta teknologi digital yang semakin canggih, adanya internet, media sosial serta alat komunikasi digital lainnya yang dijadikan sebagai akses penghubung.

Hal ini telah mengubah cara pandang orang berpartisipasi dalam kehidupan politik dan memberikan media baru bagi mereka untuk dapat berkontribusi dalam kehidupan politik dan memberikan media baru bagi mereka untuk ikut berkontribusi mengemukakan pendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Demokrasi era digital telah melahirkan cara baru bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi, sehingga tidak perlu lagi untuk mengerahkan fisik untuk mengerahkan energi partisipatif. Cukup melalui akun media sosial. Bukan hanya sekedar partisipasi yang bisa dilakukan, tapi juga untuk unjuk rasa. Di era demokrasi digital saat ini suatu protes dapat dilakukan melalui komputer ataupun *handphone*. Bahkan kekuatan dari

protes tersebut bisa lebih cepat di tanggap di bandingkan model protes era demokrasi sebelumnya (Andriadi, 2017: 6).

Partisipasi politik digital merupakan partisipasi yang dilakukan melalui media sosial. Yang mana partisipasi tersebut dapat dikatakan sebagai partisipasi politik online, hal tersebut karena ruang yang digunakan menggunakan media sosial. Partisipasi politik online ialah kegiatan politik yang dilakukan secara daring yang mana bertujuan untuk dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. (Banna 2020 :5)

Dapat disimpulkan bahwasanya partisipasi politik digital merupakan suatu kegiatan politik masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik yang dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu baik melalui media sosial ataupun website.

Partisipasi politik kini dilakukan dengan menggunakan media sosial yang mana memang mempunyai perbedaan dengan partisipasi politik sebelumnya atau dikenal dengan partisipasi politik tradisional. Penggunaan media sosial yang dijadikan sebagai sarana partisipasi politik dapat membangun adanya kedekatan yang lebih intens antara masyarakat dengan berbagai lembaga. Dengan hal tersebut membuat masyarakat memiliki kemudahan dan kenyamanan untuk dapat saling berbagi pendapat dan dilakukan secara terang-terangan dan tentunya bebas.

Media digital dapat dikatakan telah mampu mengubah struktur politik Indonesia, seperti halnya masyarakat telah menggunakan media sosial

untuk kepentingan partisipasi politik serta mengepresikan opini politik mereka (Saud, 2021). Media sosial itu sendiri merupakan bentuk dari perkembangan digital yang dapat digunakan sebagai sarana partisipasi politik digital.

Berdasarkan definisinya media sosial merupakan seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya berbagai jenis interaksi yang sebelumnya belum tersedia bagi orang awam (Brogan dalam Liedfray 2022: 2)

Media sosial juga merupakan suatu media online yang dapat digunakan secara mudah untuk melakukan partisipasi, sharing, membuat berbagai isi seperti blog, forum, jejaring sosial, wiki dan dunia virtual oleh para penggunanya. Membuat blog, forum, jejaring sosial serta wiki ialah bentuk dari media sosial yang paling sering digunakan secara umum oleh berbagai pengguna di berbagai negara. (Cahyono, 2016).

Definisi dari media sosial bukan hanya sebatas gagasan tidak berdasar yang telah dikemukakan para ahli, berbagai peranan serta dampak bagi kehidupan manusia oleh keberadaan media sosial harus dirancang sedemikian rupa hal tersebut untuk mengupayakan media sosial tetap tertuju pada fungsi dan tujuannya.

Menurut Nugroho dalam buku Heryanto yang berjudul *Media Komunikasi Politik* (2018:47) dalam penelitian yang dilakukan oleh Wright dan Hinson (2008) menyimpulkan beberapa hal yang dikemukakan oleh para praktisi PR tentang dampak kehadiran media

baru, khususnya media sosial yang sekaligus bisa menjadi peluang diantaranya:

1. Menyediakan peluang untuk berkomunikasi lebih banyak, serta memberikan wadah untuk mengepresikan ide, informasi, dan opini,
2. Membuka kesempatan baru untuk berkomunikasi secara langsung dengan khalayak, walaupun dapat menimbulkan risiko seperti berkembangnya adanya informasi negatif. Komunikasi lebih menjadi personal dan dapat berlangsung tanpa perantara.
3. Meningkatkan komunikasi dan informasi secara cepat untuk berbagi isu.
4. Membuka kesempatan untuk meraih khalayak dengan efektif dan efisien.
5. Membuka kesempatan untuk meraih khalayak baru dari kelompok para muda atau usia yang tidak tersentuh oleh media *mainstream* yang biasa digunakan oleh organisasi.
6. Blog dan media sosial membuka komunikasi secara global.
7. Media baru memungkinkan organisasi untuk memperoleh data atau informasi dengan cepat tentang bagaimana pendapat publik terhadap organisasi tersebut.

Selain itu Heryanto (2018:326) juga mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) proses penggunaan media sosial dalam proses demokratisasi diantaranya:

1. Internet termasuk media sosial dijadikan sebagai sumber informasi.

Dengan adanya media ini masyarakat menjadi melek informasi.

2. media sosial yang berbasis internet adalah media yang menjanjikan potensi interaktivitas yang paling tinggi diantara para anggotanya dibanding media masa.
3. partisipasi muncul dari keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan kepentingan umum. Terdapat tiga jenis partisipasi; (a) partisipasi kebijakan untuk mendukung atau menentang suatu kebijakan, (b) partisipasi politik, mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik atau terlibat dalam pembuatan agenda, (c) partisipasi sosial, untuk meningkatkan modal sosial seperti solidaritas atau petisi publik.
4. Desentralisasi, yaitu untuk membawa pemerintah lebih dekat ke rakyat dalam rangka memudahkan masyarakat terlibat dalam praktik politik.

Adapun salah satu varian dari media sosial yang banyak digunakan ialah media sosial facebook. Facebook merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk dapat saling terhubung atau berinteraksi sosial dari berbagai penjuru dunia (Hanafi, 2016: 6). Varian dari salah satu media sosial ini memberikan fitur yang sederhana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh para penggunanya. Facebook juga merupakan salah satu media sosial yang populer dikalangan masyarakat, bahkan masyarakat lebih mengenal istilah facebook dibandingkan internet.

Berbagai keistimewaan facebook terlihat dari fiturnya, namun yang

tidak kalah penting dalam peranannya media sosial facebook juga dapat mengembangkan suatu partisipasi politik diantaranya ialah seperti mengepresikan berbagai opini, menggalang kesolidaritasan seperti mengisi petisi serta kampanye sudah menjadi bagian yang lumrah. Dibandingkan dengan media sosial lainnya seperti instagram, twitter, tiktok dll. Facebook lebih mudah dan nyaman digunakan untuk dapat memposting atau mengepresikan opininya melalui status kalimat di profil. Oleh sebab itu masyarakat kerap menggunakan media sosial facebook untuk dapat melakukan partisipasi politik digital.

Partisipasi politik digital atau partisipasi politik yang dilakukan melalui media sosial memang memiliki perbedaan dengan dengan partisipasi politik yang dilakukan secara tradisional. Partisipasi yang dilakukan secara digital juga kini lebih dapat membentuk hubungan yang lebih aktif serta signifikan terhadap berbagai lembaga resmi, yang mana membuat masyarakat lebih merasa mudah untuk dapat menyalurkan berbagai opini atau pendapat mereka secara terbuka dan bebas. (Alatas, 2014)

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan pembandingan dalam penelitian. Dari hasil karya ilmiah penelitian terdahulu ini, penulis mengutip beberapa poin untuk melengkapi penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai perbandingan ini diantaranya;

1. Christiany Juditha dan Josep Darmawan (2018).

Dalam Jurnal Christiany Juditha & Josep Darmawan berjudul “Penggunaan Media Digital dan Partisipasi Politik Generasi Milineal” dalam penelitian ini digunakan metode survei serta pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan media digital terdapat tiga hal diantaranya ialah perangkat digital, media digital serta konten digital. Terdapat kesimpulan bahwa generasi milineal menggunakan telepon seluler sebagai perangkat yang digunakan mereka. Media digital yang paling umum digunakan ialah media sosial serta diskusi online. Sedangkan yang sering diakses dalam konten digital ialah fil, chat, serta vidio digital.

Dalam penelitian ini menerangkan bahwasanya generasi milineal beranggapan topik politik merupakan topik yang dianggap biasa saja. Akan tetapi mereka juga masih tetap mengikuti berbagai isu-isu atau berita mengenai politik yang diakses melalui media online serta televisi.

2. Dian Lestari (2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari (2019) yang berjudul “Penggunaan Media Sosial dalam Interaksi Sosial Kegiatan Akademik Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung” metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan dan analisa menggunakan analisis kualitatif.

Dalam penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mahasiswa ketika mereka sedang berkumpul, melakukan diskusi, ketika sedang belajar di kelas serta ketika mereka sedang menyendiri mahasiswa

tidak bisa lepas menggunakan media sosial, ketika mahasiswa menggunakan media sosial kapan dan dimanapun mereka tidak terlalu tidak menghiraukan teman yang berada disekitarnya. Serta terdapat dampak positif diantaranya ialah melalui media sosial pertemanan dapat terjangkau luas, mudahnya mencari dan mendapatkan berita, melakukan diskusi, dimanfaatkan sebagai media belajar, mempermudah komunikasi dengan jarak jauh serta mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan informasi materi kuliah secara cepat. Sementara dampak negatif yang didapatkan ialah media sosial mengakibatkan kurangnya sosialisasi dengan lingkungan sekitar, perilaku konsumtif mahasiswa, waktu belajar yang berkurang, gangguan kesehatan, perilaku malas setra pemborosan uang.

3. Andhika Rivaldy, Hana Aviela Fedria Wowor, Salsa Ratu Maisya, Dini Safitri (2021)

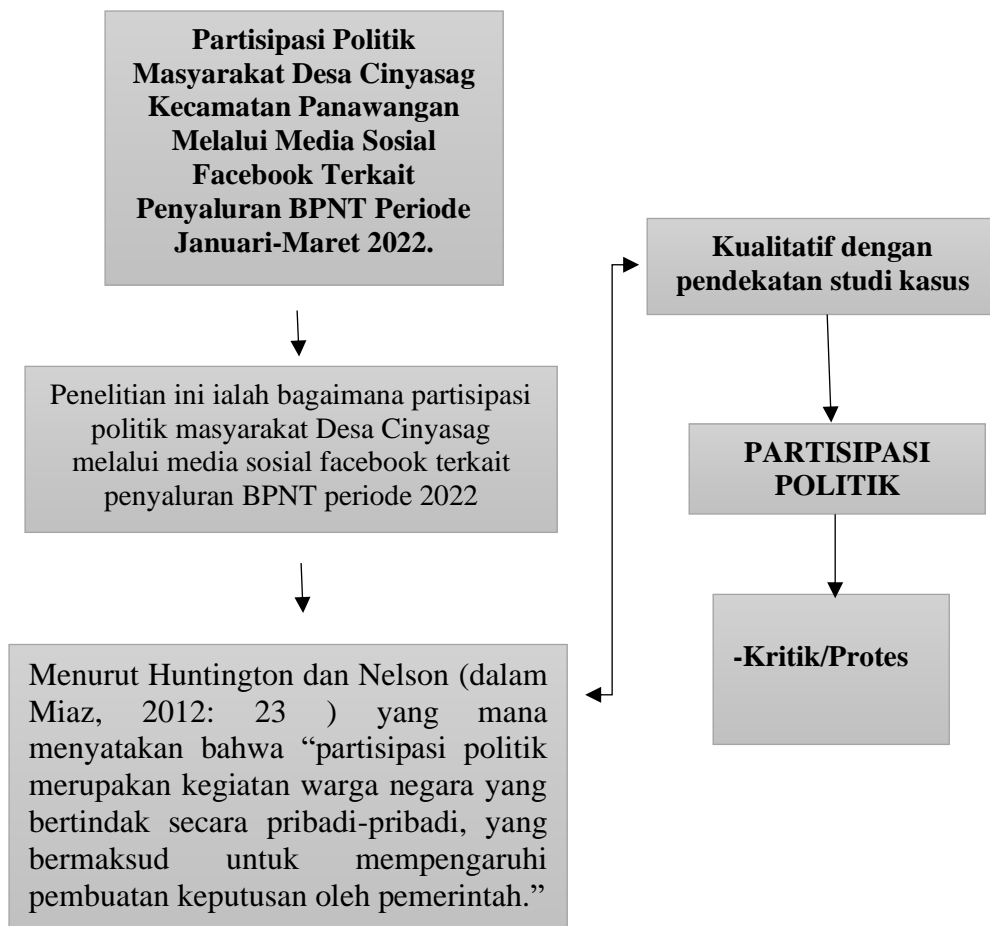
Dalam jurnal Andhika Rivaldy dkk. yang berjudul “Penggunaan Twitter dalam Meningkatkan Melek Politik Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Jakarta” dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dimana datanya merupakan kata-kata.

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya dengan penggunaan twitter yang dilengkapi berbagai fitur dan segala fungsinya dapat memberikan peningkatan terhadap melek politik dan partisipasi politik bagi para mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan pendapat mereka twitter dapat membantu menjadikan mereka lebih kritis serta berpandangan yang lebih luas dalam

menyampaikan pendapat, berbedanya karakteristik dari banyaknya pengguna twitter membuat mereka yang aktif berpendapat lebih bisa memahami perbedaan berbagai pandangan, tidak hanya terbatas pada perbedaan namun juga dapat memudahkan mereka untuk mencari berita politik.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian tentu dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman untuk dapat menentukan arah dari penelitian tersebut. Maka alur berdasarkan alur kerangka pemikiran dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Berdasarkan bagan tersebut penelitian ini yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Melalui Media Sosial Facebook terkait Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Periode Januari-Maret 2022, dengan rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan terkait penyaluran BPNT periode 2022. Penelitian ini menggunakan teori atau konsep mengenai bentuk partisipasi politik menurut Huntington & Nelson dalam (Miaz, 2012: 23). mengemukakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi, yang bermaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana akan menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata secara lisan ataupun tulisan dari berbagai informan yang akan diamati, dalam metode ini juga akan menggunakan pendekatan studi kasus yang nantinya akan menghasilkan bentuk partisipasi politik secara digital melalui media sosial facebook.